

## Wagub DKI Minta Penyintas Covid-19 Tetap Patuhi Prokes

JAKARTA (IM)- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta penyintas Covid-19 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hal itu karena potensi terpapar kembali masih berpeluang terjadi. "Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga imun tubuh karena kemungkinan terinfeksi lagi masih tetap ada," kata Riza di Jakarta, Kamis (22/7).

Dia mendorong warga termasuk para penyintas untuk tidak melupakan aturan 5M, yakni memakai dobel masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tak hanya itu, Riza juga berbagi tips kepada warga dan penyintas Covid-19 untuk menjaga imunitas.

Caranya dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidur cukup, menghindari stres dan vaksinasi. Bagi para penyintas, sambung dia, tetap harus divaksin, yakni tiga bulan setelah dinyatakan sembuh.

Riza menyampaikan, keperluan tes usap PCR setelah dinyatakan sembuh dan usai menjalani isolasi mandiri. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), tes usap PCR ulang tidak perlu dilakukan apabila hasilnya tetap positif setelah dua pekan.

Alasannya, karena tes PCR masih dapat mendeteksi virus, bahkan yang sudah mati di saluran udara. Hasil tes PCR, kata dia, dapat tetap positif hingga delapan pekan, bahkan ketika pasien sudah tidak dapat menularkan virus setelah 10 hari sejak timbulnya gejala.

Pasien dapat dinyatakan sembuh setelah hari ke-10, sejak timbulnya gejala, selama tidak mengalami gejala pada hari ketiga berikutnya. Jika gejala sudah hilang pada hari keenam, pasien itu dinyatakan sembuh setelah hari ke-10 dan jika gejala masih ada setelah hari ke-12, perlu menambah tiga hari lagi masa isolasi. ● yan

## Wali Kota Depok Minta ASN Sisihkan Gaji Beli Produk UMKM

DEPOK (IM)- Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan pemerintah Depok agar menyisihkan uangnya untuk berbelanja produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Anjuran itu dituangkan oleh Idris dalam Surat Edarannya nomor 510/378-DKUM tentang Belanja Produk UMKM Kota Depok tertanggal 21 Juli 2021.

Dalam beleid tersebut, Idris mengatakan, agar seluruh perangkat daerah, Camat dan lurah se-Kota Depok dapat mengajak para ASN nya dalam rangka dukungan nyata untuk UMKM dan warga selama pandemi Covid-19.

"Kepada perangkat daerah, Camat, dan lurah se-Kota Depok diminta untuk mengajak ASN di unit kerjanya masing-masing

menyisihkan penghasilannya dengan berbelanja produk UMKM Kota Depok," kata Idris dalam edaran yang diterima, Kamis (22/7).

Lebih lanjut, Idris menyebutkan produk UMKM itu bisa diperoleh dari UMKM Binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas UMKM Kecamatan, dan Koperasi Depok. "Produk UMKM Depok yang dibeli tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat atau aparat yang sedang isolasi mandiri (soman)," kata Idris.

Selain itu, Idris juga meminta para ASN yang telah membeli produk UMKM Kota Depok untuk mengunggah di media sosial pribadi dengan hashtag #ASNDepokPeduli dan #BeliProdukUMKMDepok, serta melaporkan kegiatan kepada Wali Kota. ● pp

IM / MADONG LUBIS



### TIDAK PASANG PAPAN PROYEK

Perbaikan Turap Kali di depan Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/7). Pekerjaan sudah dilaksanakan dari seminggu lalu. Namun, tak terlihat ada Papan Proyek terpasang oleh pelaksana di lokasi kegiatan. Padahal, hal tersebut merupakan keharusan bagi kontraktor memasang papan proyek sebelum pekerjaan dimulai.

## Mulai Jumat Ini, Pelanggar Prokes di Bekasi Dikenakan Sanksi Tipiring

BEKASI (IM)- Mulai Jumat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih tegas dalam memberikan tindakan kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes) di wilayahnya.

Keputusan itu, setelah pemerintah setempat menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Level 4 hingga 25 Juli mendatang.

Masyarakat, pelaku usaha ataupun perusahaan yang melanggar, akan dikenakan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan. "Sanksi tipiring itu berupa penjarra paling lama tiga bulan dan atau denda paling sedikit Rp500 ribu, paling banyak Rp50 juta," kata Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, Dodo Hendra Rosika, Kamis (22/7).

Untuk itu, kata dia, petugas gabungan antara pemerintah, kepolisian dan TNI bakal meningkatkan kegiatan operasi yustisi serta inspeksi mendadak atau sidak pada sektor non esensial dan kritikal di masa perpanjangan PPKM level 4 ini. "Kita akan menitikberatkan pada penindakan tegas tetapi tetap manusiawi," ucapnya.

Adapun aturan yang diterapkan itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021. Dimana pada aturan itu diterapkan sanksi penjarra maksimal tiga bulan hingga denda

minimal Rp 500 dan maksimal Rp 50 juta, sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Harapannya, jangan sampai ditemukan ada pelanggaran dan masyarakat patuh dengan aturan pemerintah.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Windhy Mauliy, menyatakan dalam penindakan tipiring itu, pihaknya melibatkan TNI, Polri, Kejaksanaan hingga Pengadilan. Pihaknya juga akan memaksimalkan lagi jumlah personel untuk melakukan sidak ke beberapa tempat yang berpotensi melanggar prokes dan PPKM Darurat.

"Untuk PPKM level 4 secara aturan tidak jauh berbeda dengan PPKM darurat. Tapi kemarin kita hanya berikan edukasi, teguran dan surat pernyataan mulai besok sudah akan kita berikan sanksi tipiring," ungkapnya.

Sebelumnya petugas lebih mengedepankan langkah-langkah persuasif humanis berupa sosialisasi, dan edukasi.

Sejak penerapan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli, sudah ada 33 tempat usaha yang disegel. Tempat usaha itu mulai dari rumah makan, tempat futsal, fitness, dan lainnya. Sementara untuk perusahaan ada dua yang disegel, karena tidak memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). ● pp

# 4 | Metropolis



IDN/ANTARA

### REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN MH THAMRIN

Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (22/7). PT MRT Jakarta (Persero) kembali melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar proyek tersebut karena adanya pekerjaan terowongan (tunneling) dalam pembangunan Stasiun Monas dan Thamrin selama masa konstruksi periode Juli 2021 sampai Desember 2022.

### CURHATAN WARGA JAKARTA

# Dampak PPKM, Pendapatan Anjlok, Bansos Kurang, Cicilan Numpuk

Mereka berharap, ke depan, bantuan dari pemerintah kepada rakyat menengah ke bawah lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, mereka juga meminta akses bagi para pedagang dan pengusaha kecil pun dibuka kembali.

JAKARTA (IM)- Pemerintah saat ini terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi virus Corona berlangsung. Namun bantuan itu rupanya dinilai masih kurang oleh sejumlah warga.

Suryono (46), warga di daerah Jayakarta, Sawah Besar, mengatakan bantuan pemerintah selama ini dinilai masih belum cukup memenuhi kebutuhannya. Pemasukannya berkurang selama pandemi berlangsung. "Bantuannya nggak sesuai sama kehidupan ya. Kita kan kalau gaji dikurangkan atau karyawan dirumahkan Rp 300 ribu sebulan nggak cukup,"

kata Suryono saat ditemui di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (22/7).

Pria yang sehari-hari bekerja di pabrik ini bercerita, sebelum pandemi, biasanya tiap bulan dia memiliki pemasukan tambahan lewat usaha kos. Namun, karena warga memilih pulang kampung, usaha kosnya pun mati suri.

Seperti jatuh tertimpa tangga, bantuan yang diharapkan dari pemerintah pun dianggap masih jauh dari kata cukup.

"Sangat terdampak sekali karena kita kan butuh penghidupan ya, untuk cicilan motor, cicilan utang, cicilan nggak kebayar dengan adanya

pandemi ini. Biasanya kan kita ada uang tambahan dari kosan, tapi kan kosan kosong karena pada pulang kampung. Jadi nggak bisa bayar cicilan," ujar Suryono.

Suryono berharap ke depan bantuan dari pemerintah kepada rakyat menengah ke bawah lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, dia meminta akses bagi para pedagang dan pengusaha kecil pun dibuka kembali.

"Harapan ke pemerintah, ya kalau bisa warganya yang kena PHK yang dagang-dagang dibolehin, biar ekonominya berjalan. Kalau yang dagang nggak boleh, diusir, ya ekonomi bakal nggak bisa. Kasihan yang pedagang kecil," katanya.

"Bantuan juga ditingkatkan, kurang segitu mah," tambah Suryono.

Hal senada disampaikan oleh warga Sawah Besar lainnya bernama Ending Samsudin (52). Pedagang mi ayam ini berharap perhatian pemerintah ke warga yang tinggal di daerah pinggiran Jakarta lebih ditingkatkan.

Meski mengaku sejauh ini bansos kepada warga di lingkungannya tidak tersendat, dia berharap perhatian kepada warga-warga di 'slum area' lebih baik lagi selama pandemi virus Corona.

### Harus Putar Otak

Wati, warga Rusun Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus) kini sibuk memutar otak untuk bertahan hidup di masa pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ibu dari tiga anak ini menceritakan pendapatannya anjlok sejak PPKM. Tak hanya soal kebutuhan sehari-hari, dirinya mengaku biaya sekolah dan kuliah anak-anaknya pun menjadi beban pikiran.

"Namanya saya juga punya anak sekolah dan kuliah ya, pendapatannya turun jauh. Jauh banget. Soalnya anak saya satu kuliah, satu SMP swasta, satu lagi masih les, SD. Ya kalo nggak di-les-in ketinggalan pelajaran, 3 anak," kata perempuan 45 tahun itu di Rusun Petamburan, Kamis (22/7).

Wati menjelaskan dirinya aktif dalam kegiatan Pem-

berdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di lingkungan tempat tinggal. Dari mengikuti kegiatan itu, dirinya kerap nyambi berjualan makanan sehingga pemasukan cukup untuk menghidupi keluarganya.

Namun kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan mobilitas membuat kegiatan kumpul-kumpul anggota PKK terhenti. Kini, Wati kehilangan penghasilannya dari kegiatan PKK.

Pengurus Rusun Petamburan, Sutarno (52) mengakui sejumlah warganya memang terdampak kebijakan PPKM, terutama warga dengan penghasilan harian. Sutarno seringkali menjadi tempat warganya menupahkan keluh kesah hidupnya mendapat penghasilan di masa PPKM.

"Sangat terasa betul, banyak warga yang harus diam di rumah. Sangat terasa-lah bagaimana pendapatan warga di sini menurun. Yang paling terpujok ya mereka yang bekerja harian, kaya ojol, ada yang bekerja pedagang gitu, sangat berdampak sekali buat mereka," cerita Sutarno. ● yan

## Pemkab Bekasi Klaim Penurunan Angka Keterisian RS Selama PPKM Darurat

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi ikut Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual di Command Center, Diskominfosantik, Rabu (21/7). Rapat tersebut membahas perpanjangan masa PPKM Darurat dan persiapan relaksasi PPKM ke Level 2.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah resmi memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang semula berakhir pada 20 Juli diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi dalam wawancara terpisah. Ia menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM ini bertujuan menurunkan angka Covid-19 untuk mampu naik ke level 3, karena Kabupaten Bekasi masih berada di level 4.

"Resmi diperpanjang, dan tadi juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Bekasi masih di posisi level 4. Artinya level ini harus sudah punya langkah kedepan untuk naik menjadi level 3," ujarnya dalam rilis Humas Pemkab Bekasi, Rabu (21/7) sore.

Dirinya berharap, jika terjadi penurunan di tanggal 26 Juli, nantinya akan ada kelonggaran untuk para pelaku usaha, sehingga dari segi perekonomian dan kesehatan berjalan dengan baik.

Perihal Bantuan Sosial (Bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat, Herman menyampaikan bantuan tersebut datang dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dan sudah disalurkan ke beberapa

desa dan kecamatan, selanjutnya akan ada bantuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Sri Enny Maniarti menyampaikan bahwa akan ada kerjasama dengan BPBD, TNI, Polri dan Dinas Kesehatan untuk terus melakukan Testing, Tracing dan Treatment (3T).

"Kalau hanya mengandalkan Dinas Kesehatan saja tidak cukup, jadi ada dari BPBD, TNI, POLRI untuk mengerjakan 3T ini," tuturnya.

Selain diadakannya kerjasama, Enny juga menjelaskan bahwa angka data Rumah Sakit di Kabupaten Bekasi sudah mulai menurun.

"Laporan dari beberapa rumah sakit saat ini dari dua minggu yang lalu, angka rumah sakit sudah mulai turun," jelasnya. ● mdl



FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM HUMAS PEMKAB BEKASI.

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Forkopimda sedang mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan secara virtual di Command Center Gedung Diskominfosantik Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Rabu (21/7).

### PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Sumber Ana Gas, suatu perseroan yang berkedudukan di Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Saham tanggal 18 Juni 2021 Nomor 152 yang dibuat di hadapan Humberto Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya tanggal 9 Juli 2021 Nomor AHU-0039111.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya tanggal 9 Juli 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0427189 dan Nomor AHU-AH.01.03-0427190, PT Super Capital Indonesia telah melakukan pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan.

Jakarta, 23 Juli 2021  
Direksi Perseroan



PT. Maming Enam Sembilan Mineral Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

### PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT. Maming Enam Sembilan Mineral Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021  
Waktu : 10.0 WIB s/d Selesai  
Tempat : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites IX Sudirman, Jl. Jend. Sudirman, RT.1/RW.3, Senayan Tanah Abang, Jakarta 10270

Mata Acara RUPS, yaitu:

1. Penetapan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.

4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan : 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan RUPST ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs website Perseroan [www.mesmineralea.com](http://www.mesmineralea.com), situs website PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASYKSEI.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. b. Formulir Surat Kuasa dapat di unduh dari situs website Perseroan atau dapat diperoleh setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sharestar Indonesia beralamat di Berratasua Plaza (dahulu Citra Graha Building) lantai 7 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan dan Surat Kuasa harus diterima Sekretaris Perusahaan melalui Biro Administrasi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 16.15 WIB.

4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menggunakan kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy pada sistem <http://easy.ksei.co.id>. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASYKSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download/data-am-user-guide>).

5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk memperhatikan Kartu Tanda Pengenal atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.

6. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir.

7. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Perseroan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 untuk menjaga kesehatan. Bagi para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, wajib:

- Membawa Surat Keterangan Tes Swab Covid-19 (Antigen atau PCR) yang dibayai sendiri dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, pusat kesehatan atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum RUPST.
- Menggunakan masker.
- Pengukuran suhu tubuh pada meja registrasi.
- Penerapan kebijakan physical distancing.

9. Bahasan terkait agenda RUPST tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan terlentnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan berada di ruangan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 23 Juli 2021  
Direksi Perseroan